STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK)

DI KOTA BANDUNG

*POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT INNOVATION PROGRAM (PIPPK)*

*IN BANDUNG CITY*

**Merdi Hajiji[[1]](#footnote-1), Didi Turmudzi[[2]](#footnote-2), Thomas Bustomi[[3]](#footnote-3)**

**NPM. 129213006**

**[merdihajiji6672@gmail.com](mailto:merdihajiji6672@gmail.com)** [**didi.turmuzdi@ unpas.ac.id**](mailto:didi.turmuzdi@%20unpas.ac.id%20)  **thomas.bustomi @unpas.ac.id**

Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Pasundan,

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggambarkan implementasi kebijakan publik pada program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Faktor dominan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Bandung 2) Alternatif strategi kebijakan yang harus dilakukan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat di Bandung efektif. Metode yang digunakan untuk akuisisi data dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion*. Studi kasus pemrosesan data kualitatif meneliti teori implementasi model kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian implementasi kebijakan publik dalam program pemberdayaan masyarakat belum efektif dan indikatornya adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan (Standar dan Tujuan Kebijakan) belum berjalan dengan baik, 2) Faktor sumber daya yang menyebabkan implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Bandung belum efektif 3) Faktor komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi yang menyebabkan implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung belum efektif. 4) Faktor karakteristik lembaga pelaksana yang menyebabkan implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung belum efektif. 5) Faktor-faktor kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang menyebabkan implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung belum efektif. 6) Faktor sikap / disposisi pelaksana yang menyebabkan implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung di Kota Bandung belum efektif.

Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang perlu dilakukan adalah strategi agresif dengan meningkatkan: 1) Strategi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat di kota Bandung 2) Strategi Integrasi Vertikal yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam mengembangkan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan wilayah seperti sinergi program dengan program bantuan desa. 3) Strategi Integrasi Horizontal yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lembaga masyarakat di tingkat Kota Bandung dalam mengembangkan kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.

***Abstract***

*This study illustrated the implementation of public policy on community empowerment programs in the City of Bandung, West Java ProvinceResearch problems: 1) Dominant factors that cause ineffective implementation of community empowerment program policies in Bandung 2) Alternative policy strategies that must be carried out so that community empowerment policies in Bandung are effective. The method used for data acquisition by in-depth interviews, participant observation, documentation studies and Focus Group Discussion Qualitative data processing case studies. examined the theory of the implementation model of Van Meter and Van Horn policies (1975). The results of the study, the implementation of public policies in community empowerment programs have not been effective and the indicators are: 1) Policy Size and Objectives (Policy Standards and Objectives) have not been running well, 2) Resource factors that cause the implementation of community empowerment program policies in Bandung have not been effective 3 ) Communication factors between organizations and implementing activities that cause the implementation of community empowerment program policies in the city of Bandung have not been effective. 4) Factors characteristic of implementing agencies that cause the implementation of community empowerment program policies in the city of Bandung have not been effective. 5) Factors of economic, social and political environmental conditions that cause the implementation of community empowerment program policies in the city of Bandung have not been effective. 6) The attitude / disposition factor of the executor that caused the implementation of community empowerment program policies in the City of Bandung in the City of Bandung has not been effective.*

*Based on the SWOT analysis, the strategy that needs to be done is an aggressive strategy by increasing: 1) Strategy for increasing the competency of human resources involved in developing community empowerment policies in the city of Bandung 2) Vertical Integration Strategy which is integrating with provincial and central government in developing development policy and territorial empowerment such as program synergies with the village assistance program. 3) Horizontal Integration Strategy that is collaborating with community institution stakeholders at the Bandung City level in developing community empowerment program policies in the City of Bandung*.

*Keywords* ***:*** *Policy Implementation and Community Empowerment Program****.***

**PENDAHULUAN**

Ikhtiar dan langkah-langkah untuk pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung merupakan implementasi nyata dari tekad, kehendak dan keinginan untuk mengurangi persoalan pembangunan secara merata di Kota Bandung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Angka kemiskinan di Daerah yang berdasarkan hasil sensus BPS Tahun 2019 tercatat sebanyak 82.432 Rumah Tangga Sasaran (RTS), menjadi fokus utama untuk dibantu, ditanggulangi, diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraannya. (PJM Pronangkis Kota Bandung, 2014-2018).

Lahirnya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah memberikan semangat baru bagi perkembangan program pemberdayaan masyarakat di kewilayahan. Pasal 230 dan penjelesaanya dari undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada kelompok masyarakat untuk bisa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara swakelola kelompok masyarakat. Skema bantuan kegiatan dengan menggunakan swakelola kelompok masyarakat merupakan perpaduan antara kebijakan pemberian-hibah dan bansos dengan kebijakan berupa program kegiatan dari perangkat daerah yang dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat penerima bantuan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat jarang pemerintah daerah yang melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan skema swakelola kelompok masyarakat, walaupun secara aturan telah diatur melalui UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 230 dan penjelesannya, PP nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta aturan teknisnya berupa peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang Swakelola.

Penelitian ini dibatasi dengan fokus pada kajian masalah implementasi kebijakan publik yaitu mengenai implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung. Fokus penelitian adalah meneliti Implementasi Kebijakan Program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.

Beberapa indikator permasalahan yang ada dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung sehingga kebijakan programnya dirasakan belum efektif antara lain :

1. Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung belum dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ada terutama terkait swakelola kelompok masyarakat.
3. Pendampingan Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung belum efektif.

Beberapa hal yang dapat dijadikan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melakukan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor dominan apa yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung?
2. Strategi kebijakan apa yang harus dilakukan agar kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung efektif ?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis :

1. Menganalisis faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kekurangberhasilan dalam implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung.
2. Mencari alternatif strategi yang tepat agar implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung berjalan secara efektif.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods)* yaitu suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Mencampur atau *blending* data ini akan memberikan pemahan yang kuat tentang permasalahan atau pertanyaan penelitian (Creswell, 2014). Secara spesifik, peneliti menggunakan Strategi metode campuran konkuren/sewaktu-waktu (*concurrent mixed methods*) yang merupakan penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah embedded konkuren. Strategi ini mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dalam waktu bersamaan. Model ini memiliki metode primer yang memandu proyek dan data sekunder yang memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian.

Strategi implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung akan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil akhir dari analisis adalah menghasilkan suatu strategi implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIPPK berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagian dan Indeks Kemasyarakatan, termasuk dalam mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman ,Sejahtera dan agamis” sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah Program pembangunan yang inovatif melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan secara kolaboratif untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di kewilayahan. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan di Kota Bandung tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RPJMD Kota Bandung 2018-2023 dalam hal ini memuat juga janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selanjutnya sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung merancang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang merupakan inisiatif dalam menjalankan strategi pembangunan daerah yang prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui inovasi masyarakat dalam menggagas program pembangunan berbasis pemberdayaan, sehingga masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung bisa mewujudkan “***Bandung Empowerment City*”**.

Perencanaan PIPPK menjadi prioritas pembahasan penting dan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari penyamaan persepsi seluruh perangkat daerah sampai perangkat daerah di Kewilayahan. Pembahasan penyusunan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan PIPPK secara langsung dipimpin oleh Walikota Bandung.

**Pembahasan**

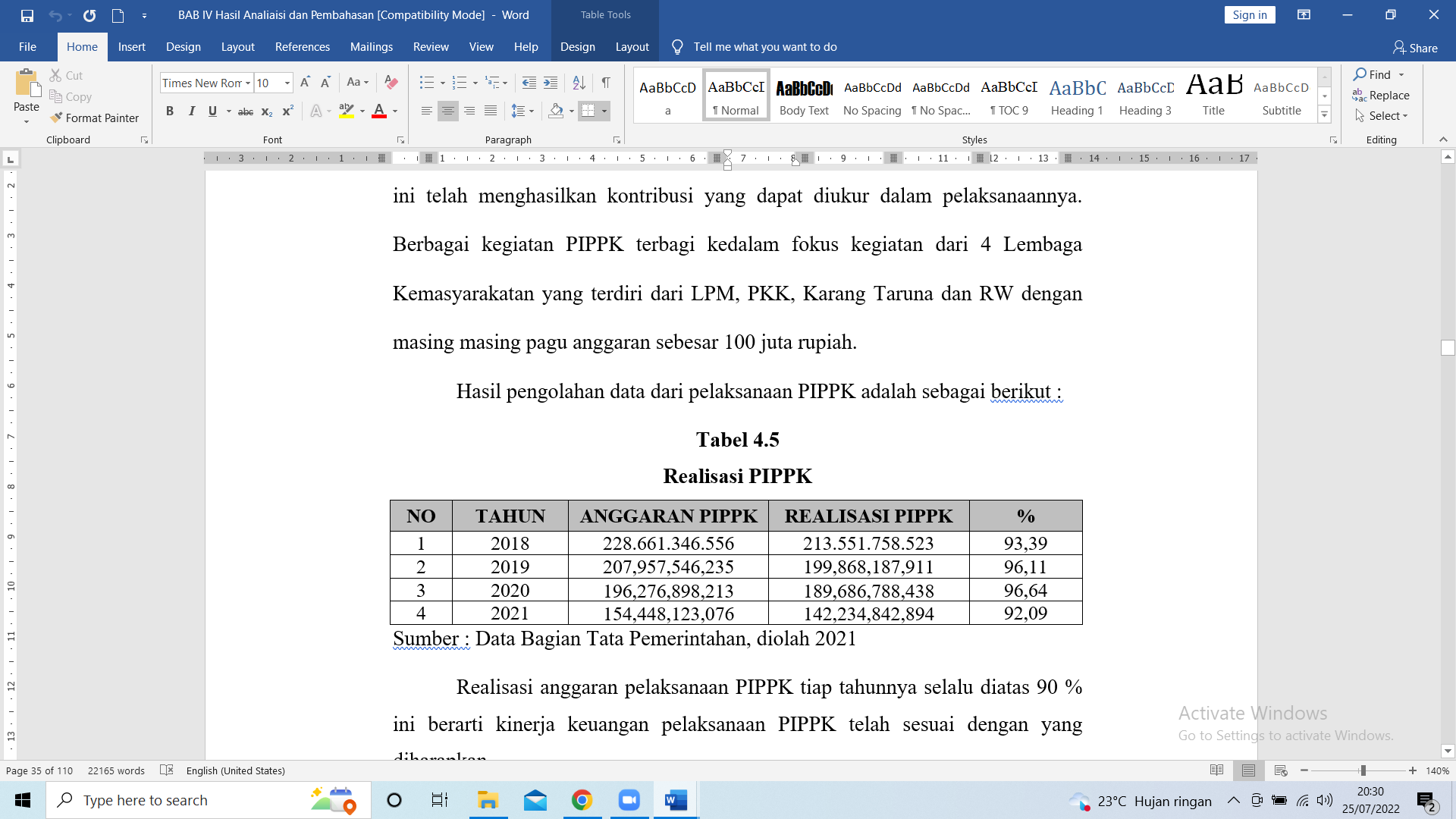
**Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)**

Pelaksanaan PIPPK yang dimulai dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 ini telah menghasilkan kontribusi yang dapat diukur dalam pelaksanaannya. Berbagai kegiatan PIPPK terbagi kedalam fokus kegiatan dari 4 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari LPM, PKK, Karang Taruna dan RW dengan masing masing pagu anggaran sebesar 100 juta rupiah.

Hasil pengolahan data dari pelaksanaan PIPPK adalah sebagai berikut:

**Tabel**

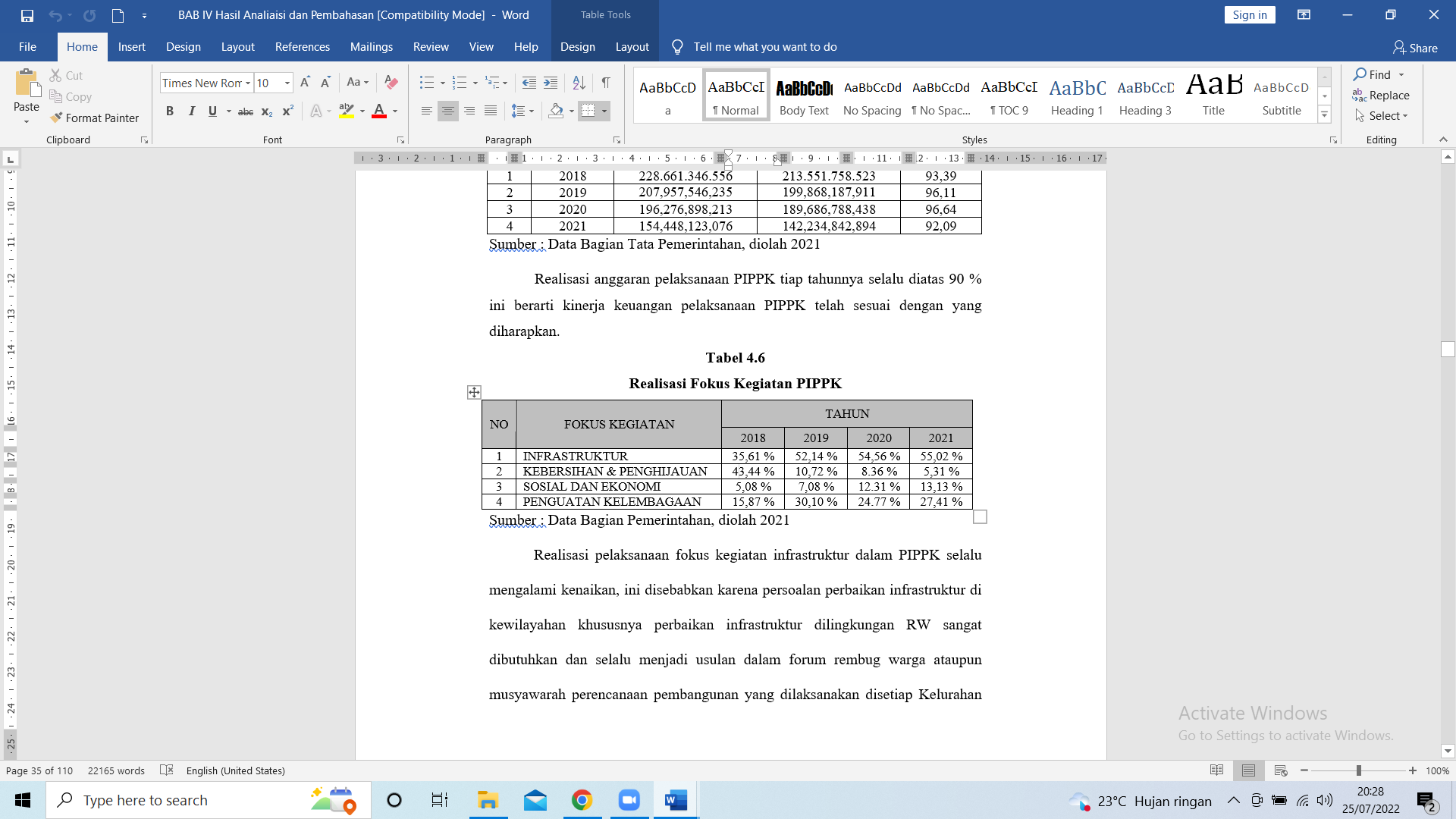
**Realisasi PIPPK**



Realisasi anggaran pelaksanaan PIPPK tiap tahunnya selalu diatas 90 % ini berarti kinerja keuangan pelaksanaan PIPPK telah sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel**

**Realisasi Fokus Kegiatan PIPPK**

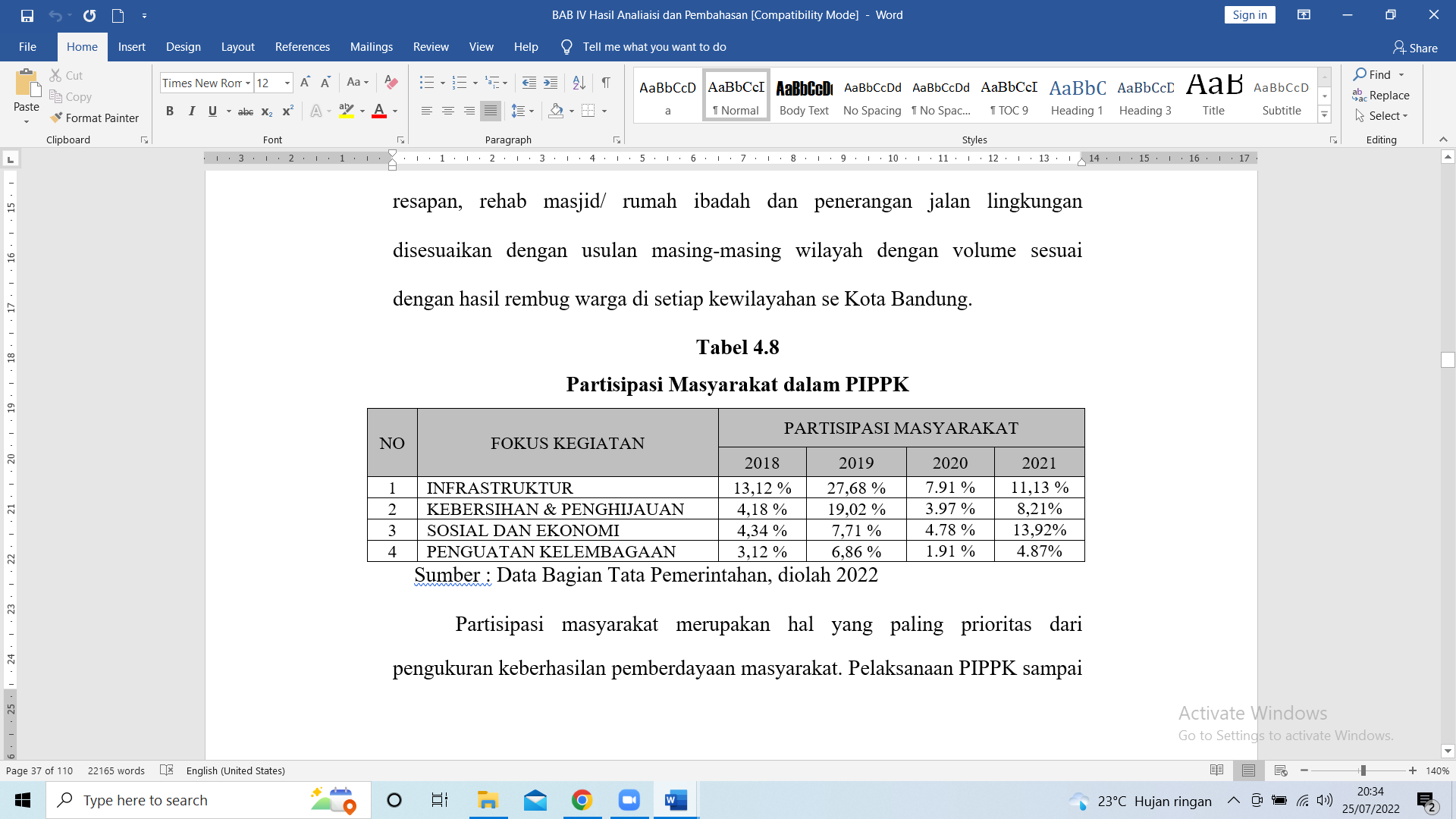


Realisasi pelaksanaan fokus kegiatan infrastruktur dalam PIPPK selalu mengalami kenaikan, ini disebabkan karena persoalan perbaikan infrastruktur di kewilayahan khususnya perbaikan infrastruktur dilingkungan RW sangat dibutuhkan dan selalu menjadi usulan dalam forum rembug warga ataupun musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan disetiap Kelurahan se Kota Bandung. Sementara untuk kegiatan kebersihan dan penghijauan setiap tahunnya menurun ini dikarenakan adanya anggaran khusus yang terpisah dari PIPPK untuk masalah kebersihan dan penghijauan yaitu adanya anggaran untuk petugas gorong-gorong dan kebersihan (Gober) di Kota Bandung. Selanjutnya untuk kegiatan sosial dan ekonomi khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat (usaha skala mikro) dan penumbuhan usaha pemula tiap tahunnya mengalami peningkatan, dan yang terakhir adalah fokus kegiatan penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan tiap tahunnya berfluktuasi ini dikeranekan disesuaikan dengan usulan masing-masing lembaga kemasyarakatan (RW, PKK, Karang Taruna dan LPM) Kelurahan se Kota Bandung.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling prioritas dari pengukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan PIPPK sampai saat ini belum cukup mendongkrak partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di kewilayahan. Dari data jumlah partisipasi masyarakat yang disajikan dalam tabel 4.6. terlihat hanya untuk kegiatan infrastruktur yang paling agak menonjol partisipasi masyarakatnya, itupun partisipasi masyarakat dalam bentuk sarana penunjang lainya seperti konsumsi dan bantuan tenaga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam PIPPK di Kota Bandung disajikan pada table berikut ini :

**Tabel**

**Partisipasi Masyarakat dalam PIPPK**

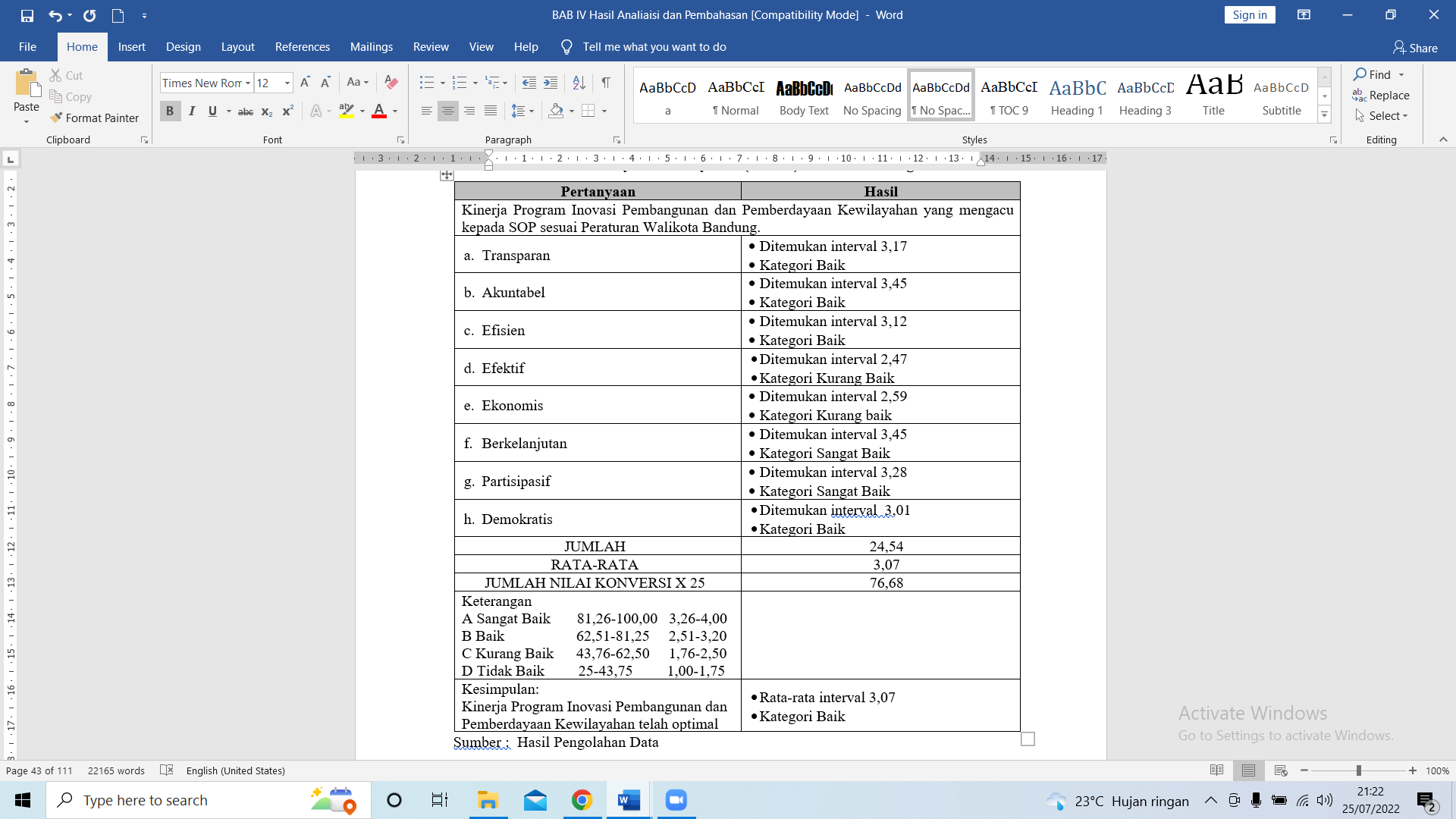


**Analisis Kinerja PIPPK**

Kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang diukur menggunakan 8 (delapan) dimensi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung nomor 15 Tahun 2019 dan Perubahan terakhir Perwal Kota Bandung nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIPPK yang dioperasionalisasikan menjadi 8 (delapan) butir pertanyaan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh gambaran tanggapan responden mengenai kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagai berikut:

**Tabel**

**Gambaran Kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung**



**Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung**

Hasil *focus group discussion* dalam acara rakor kewilayahan dan evaluasi program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung pada tanggal 22 Desember tahun 2021 bertempat di asrilia hotel dengan camat, lurah dan beberapa informan memberi petunjuk bahwa terdapat tiga faktor dominan yang memberi pengaruh pada pelaksanaan PIPPK yaitu faktor waktu (*timing*), faktor regulasi, dan faktor kehati-hatian. Faktor-faktor ini mempunyai korelasi satu sama lain, dan secara signifikan ikut memberi kontribusi pada kesiapan kelembagaan, kesiapan SDM dan kesiapan program.

**Faktor waktu (*Timing*)**

Faktor waktu memang menjadi faktor dominan mengapa program inovasi pembangunan dan pemberdayaaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung resisten dalam implementasi dan resisten dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Faktor waktu disini sebagaimana hasil wawancara dengan empat lurah dan beberapa informan pendukung lainya terbagi dua, pertama program inovasi pembangunan dan pemberdayaaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung datang secara tiba-tiba karena janji politik kepala daerah terpilih, padahal aparatur kewilayahan dan masyarakat secara kelembagaan belum siap, SDM belum siap, demikian pula program belum siap. Akibat ketidaksiapan ini maka perencanaan tidak berkualitas dilihat dari mekanisme dan partisipasi, demikian pula tidak berkualitas dilhat dari out put kebijakan seperti target dan sasaran yang jauh dari keinginan dan harapan masyarakat. Yang kedua, waktu yang dinilai oleh para kepala kewilayahan khususnya Kelurahan sangat sempit karena belum program rampung dibuat jadwal pelaksanaan program pun sudah harus dilaksanakan, dan selanjutnya pelaporannya segera dimaksukkan. Ini semua yang dikeluhkan oleh para lurah dimana waktu sangat berpengaruh pada pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.

**Faktor regulasi**

Faktor regulasi juga memberi kontribusi pada kesiapan kelembagaan, kesiapan SDM dan kesiapan program. Regulasi berupa Undang-undang dan peraturan seharusnya menjadi penuntun dan pengendali dalam pengelolaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung, namun dalam beberapa hal justru menjadi penghambat, disebabkan oleh seringnya berubah-ubah, tumpang tindih kebijakan, dan sulitnya dimengerti oleh pelaksana di lapangan, bahkan pihak Pemerintah Kota Bandung dan tim Pengarah PIPPK seringkali belum memahami sepenuhnya. Akibatnya banyak program yang kurang sesuai dengan peruntukannya, banyak program yang terlambat dilaksanakan dan dilaporkan dan tidak sedikit lurah selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ragu dalam mengambil keputusan.

**Faktor kehati-hatian**

Program inovasi pembangunan dan pemberdayaaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung merupakan salahsatu dari tujuan kunjungan kerja Kota/ Kabupaten dalam melakukan studi bandung untuk di terapkan di daerahnya, sampai tahun 2021 sudah 57 Kota/ Kabupaten dan 3 Propinsi yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi banding terhadap program inovasi pembangunan dan pemberdayaaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung. Hasil wawancara mendalam dengan empat puluh satu lurah dan beberapa informan sebagaimana telah diuraikan terdahulu membenarkan pernyataan di atas. Menurut mereka bahwa dari sekian program bantuan yang diterima oleh kewilayahan, barulah kali ini ada program yang begitu besar anggarannya, begitu disorot oleh banyak kalangan, seakan-akan program ini harus dilaksanakan dan tidak boleh ada salah sedikit pun, selain itu program ini selalu dipredikasi akan menjadi program yang bermasalah disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya aparatur di kewilayahan sebagai pelaksana dari program tersebut. Akibat rasa takut dan ragu inilah para lurah melaksanakan kegiatan dalam suasana penuh kehati-hatian.

Empat puluh satu kelurahan yang diwawancarai terdahulu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada kesan keterpaksaan menerima program tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya surat pemanggilan klarifikasi kepada 66 (enam puluh enam) orang lurah oleh aparat penegak hukum dengan nomor surat B/1209/III/ HUK.12/2019 Reskrim, perihal klarifikasi dan permintaan copy dokumen. Surat ini didasari dari adanya laporan informasi : R/LI/10/I/2019/ Reskrim tanggal 28 Januari 2019 terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap program Kotaku dan PIPPK. Kehati-hatian dalam mengelola program, tentu saja berakibat pada pembuatan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan menjadi lambat dan kurang berkualitas.

Mengenai kehati-hatian para aparatur kewilayahan khususnya Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di Kelurahan, keraguan bahkan rasa takut, memang dimaklumi, hal inilah yang melahirkan gagasan sekretaris daerah kota Bandung sebagai Ketua Tim Pengaerah PIPPK Kota Bandung, untuk melakukan antisipasi agar rasa ragu dan takut tersebut bisa hilang dan aparatur kewilayahan bisa bekerja dengan penuh percaya diri. Antisipasi itu dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi dan pendampingan program, demikian juga pemerintah daerah dalam hal ini Tim pengarah PIPPK yang secretariat hariannya ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung sudah meyampaikan perihal pendampingan dan menggandeng kejaksaan negeri Kota Bandung dan juga Porestabes Bandung menjadi tim Pengarah agar bisa mendampingi, memonitor dan juga mengawasi serta mengevaluasi program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung. Akan tetapi meskipin aparatur kewilayahan diyakinkan bahwa program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) dikelola melalui pola pendampingan, sosialisasi dan pelatihan bukan berarti rasa takut itu hilang dengan serta merta, tetap saja mereka bekerja dalam suasana keraguan dan semua yang dilakukannya atas dasar irasional dan ambigu. Orang-orang seperti inilah yang digolongkan oleh Wirawan (2013 : 656) sebagai golongan yang bekerja dan mengambil keputusan dengan pembuatan keputusan emosional. Menurutnya bahwa pembuatan keputusan emosional adalah pembuatan keputusan yang berdasarkan emosi, Pengambilan keputusan hanya menggunakan perasaan, tidak berupaya mencari alternatif-alternatif yang merupakan solusi problem. Solusi hanya apa yang muncul dalam emosi pemimpin, umumnya berdasarkan pengalaman dalam hidupnya, pengalaman tersebut memberikan kecenderungan untuk mengambil solusi yang selama ini telah dianggap baik dalam menyelesaikan problem yang dihadapi. Suasana kebatinan yang ragu, tidak percaya diri dan dihantui rasa takut digolongkan oleh Wirawan sebagai orang atau pengambil keputusan yang ambiguitas (*ambiguity*) atau orang-orang yang berada dipersimpangan antara benar dan salah, mereka berada dalam ketidak pastian, ragu dan dihantui perasaan takut dan dalam waktu bersamaan diharapkan untuk mengambil keputusan. Suasana seperti ini tentu saja akan menghasilkan keputusan-keputusan yang jauh dari tujuan, dan jauh dari harapan, oleh sebab itu menurut Wirawan seharusnya mereka yang mengalami hal seperti ini untuk kembali melakukan introspeksi melalui rasionalitas dan penuh keyakinan diri, dan hal ini hanya bisa dilakukan melalui pembuatan keputusan yang berdasar pada informasi yang objektif dan proses yang logis, prosesnya konsisten dengan pola yang telah teruji, melakukan penilian dan perhitungan alternati-alternatif yang tersedia untuk mencapai pilihan yang maksimal dalam keterbatasan sumbersumber dalam lingkungan. Kebijakan yang dilaksanakan dalam keadaa ambigu karena terlalu hati-hati, bukan saja keputusannya cenderung irasional, akan tetapi seringkali jauh dari tujuan dari kebijakan itu sendiri, padahal menurut Dwiyanto (2012) kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat, karena itulah kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga meliputi proses pembentukan masalah, bagaimana memecahkannya, bagaimana penentuan kebijakannya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan dievaluasi kuramg lebih itulah kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat dalam keadaan kehatian-hatian yang tinggi juga berakibat pada hilangnya nilai-nilai yang selama ini dianggap menjadi penuntun dan pengendali dalam kehidupan bermasyarakat, padahal menurut Parson (2011) bahwa kebijakan publik itu mengandung nilai-nilai di dalamnya, Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Nilai dimaksud disini tentu saja berhubungan dengan budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Sepanjang kebijakan itu sesuai dengan nilai budaya yang berkembang dan dianggap oleh masyarakat ada kebenaran di dalamnya, maka kebijakan itu akan berahasil di laksanakan. Sebaliknya jika tidak sesuai dengan budaya pasti akan mengalami kegagalan, betapa banyak kebijakan yang dikeluarkan baik melalui undang-undang, dan peraturan lainnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat.

Uraian di atas memberi indikasi bahwa faktor kehatian-hatian, apalagi berlebihan bukan saja menimbulkan rasa takut untuk berbuat, akan tetapi juga menghilangkan potensi kreatifitas, padahal salah satu tujuan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung diadakan disamping untuk meningkatkan kreatifitas dan kemandirian masyarakat, juga membuka peluang partisipasi, sehingga pemerintah tingkat atasnya hanya menjadi fasilitator dan regulator saja dan masyarakatlah yang menjadi ujung tombak pembangunan, pada akhirnya masyarakat di kewilayahan bisa menjadi mandiri, tanpa terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah.(Wijaya, 2012 : 5). Menghilangkan partisipasi dan kemandirian masyarakat sebagai tujuan utama program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) berarti bertentangan dengan pasal 8 Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) yang menyebut bahwa program ini harus transparan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, berkelanjutan, partisipatif dan demokratis. Filosopi lahirnya program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK), sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023 dan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di kewilayahan melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan sarana dan parasarana kelurahan serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

**Strategi Yang Efektif Terhadap Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung**

**Analisis Faktor Internal**

Analisis faktor internal ini berdasarkan Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunite and Threats* (SWOT) digunakan sebagai kerangka untuk membantu dalam mengembangkan secara keseluruhan atau sebagai dasar untuk penentuan strategi-strategi adalah yang dapat dikendalikan mencakup evaluasi terhadap beberapa faktor utama yang terkait dengan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Penentuan faktor internal diambil dari pendapat responden pemangku kepentingan terhadap kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung, yang diantaranya Walikota dan Wakil Walikota Bandung, Skretaris Daerah Kota Bandung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Ketua Paguyuban Camat dan Ketua forum Lurah.

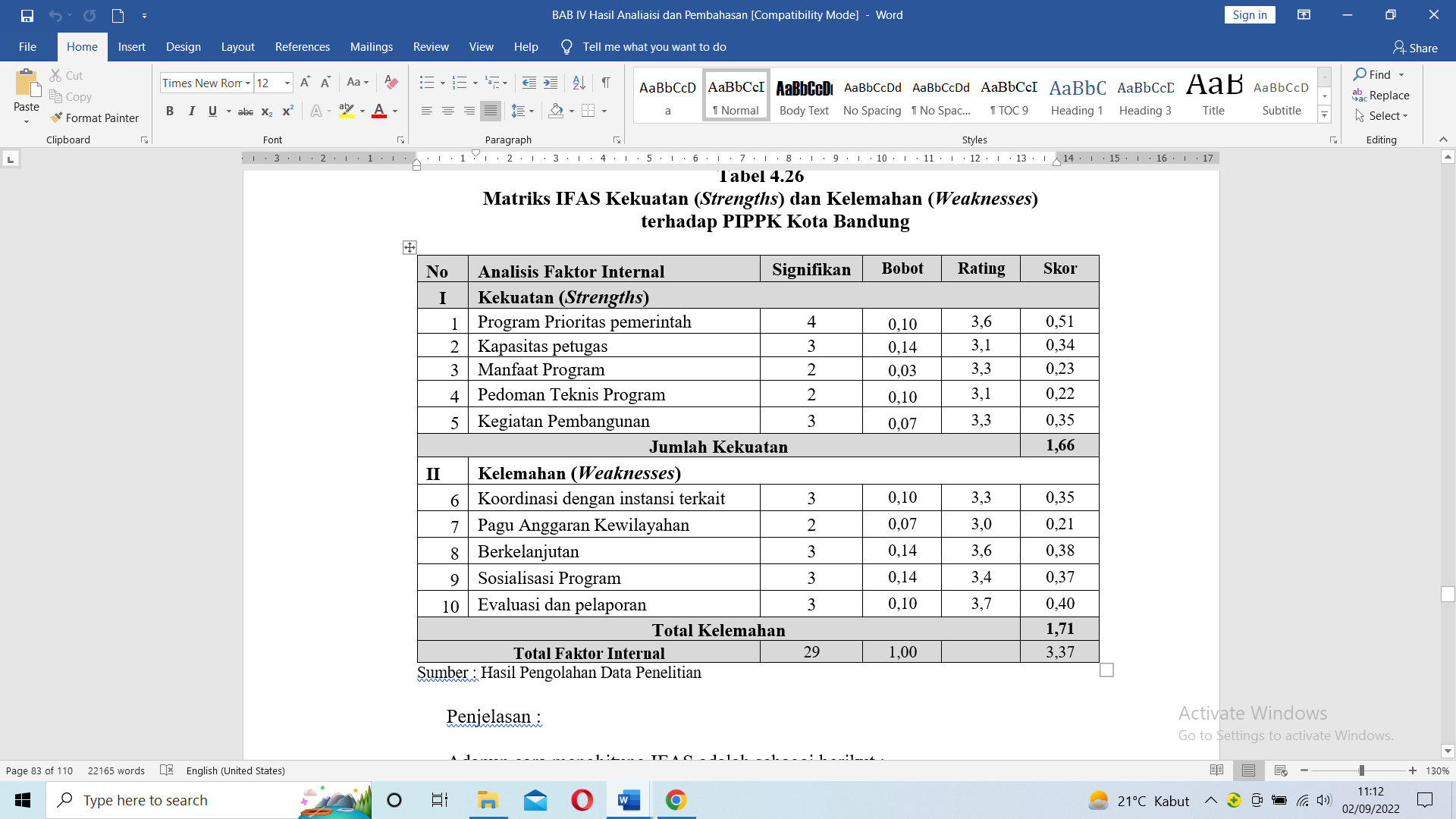
Selanjutnya diajukan pertanyaan melalui kuesioner terhadap responden untuk menentukan isu strategis faktor internal kekuatan dan kelemahan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung yang menghasilkan sebagai berikut :

1. Program Prioritas Pemerintah Kota Bandung
2. Pedoman teknis program
3. Kapasitas petugas
4. Manfaat program
5. Kegiatan pembangunan
6. Evaluasi dan pelaporan
7. Pagu anggaran kewilayahan
8. Berkelanjutan
9. Koordinasi dengan instansi terkait
10. Sosialisasi program

Isu strategis faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dikelompokan berdasarkan pendapat responden dan diurutkan sesuai dengan tingkatan prioritas isu strtategis serta dihitung bobot dan ratingnya berdasarkan rata-rata setiap isu strategis yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel**

**Isu strategis faktor Internal**



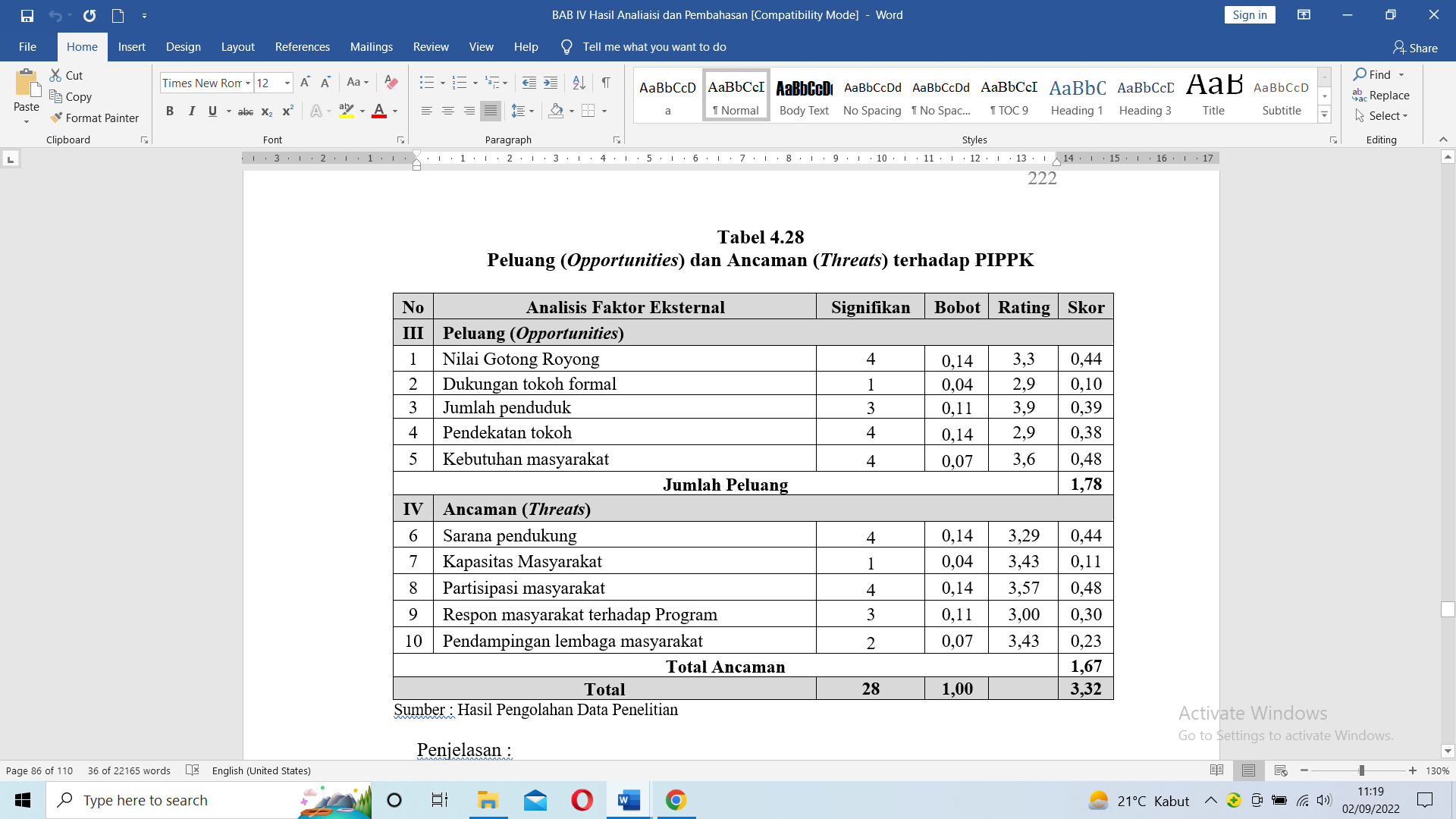
Hasil evaluasi dapat dianalisis tentang kekuatan dan kelemahan dari masing-masing aspek pada faktor internal pada analisis SWOT. Dengan demikian hasil evaluasi terhadap kinerja program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung baik program jangka pendek dan program jangka panjang.

**Analisis Faktor Eksternal**

Analisis faktor eksternal ini adalah faktor-faktor di luar program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung yang tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh terhadap peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang dihadapi. Analisis faktor eksternal digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel**

**Isu Strategis Faktor Eksternal**



Hasil evaluasi dapat dianalisis tentang peluang dan ancaman dari masing-masing aspek pada faktor ekaternal pada analisis SWOT. Dengan demikian hasil evaluasi terhadap kinerja program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal penyusunan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung baik program jangka pendek dan program jangka panjang.

Posisi strategis program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung setelah dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, perlu dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*) untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan strategi kebijakan yang efektif dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Cara perhitungan IFAS (*Internal Factors Analysis Strategy*), yaitu :

X = *Strengths - Weakness*

= 1,66 – 1,71

= - 0,05 (negatif)

Cara perhitungan EFAS (*Eksternal Factors Analysis Strategy*), yaitu :

Y = *Oppurtunities - Threats*

= 1,78 – 1,56

= 0,22

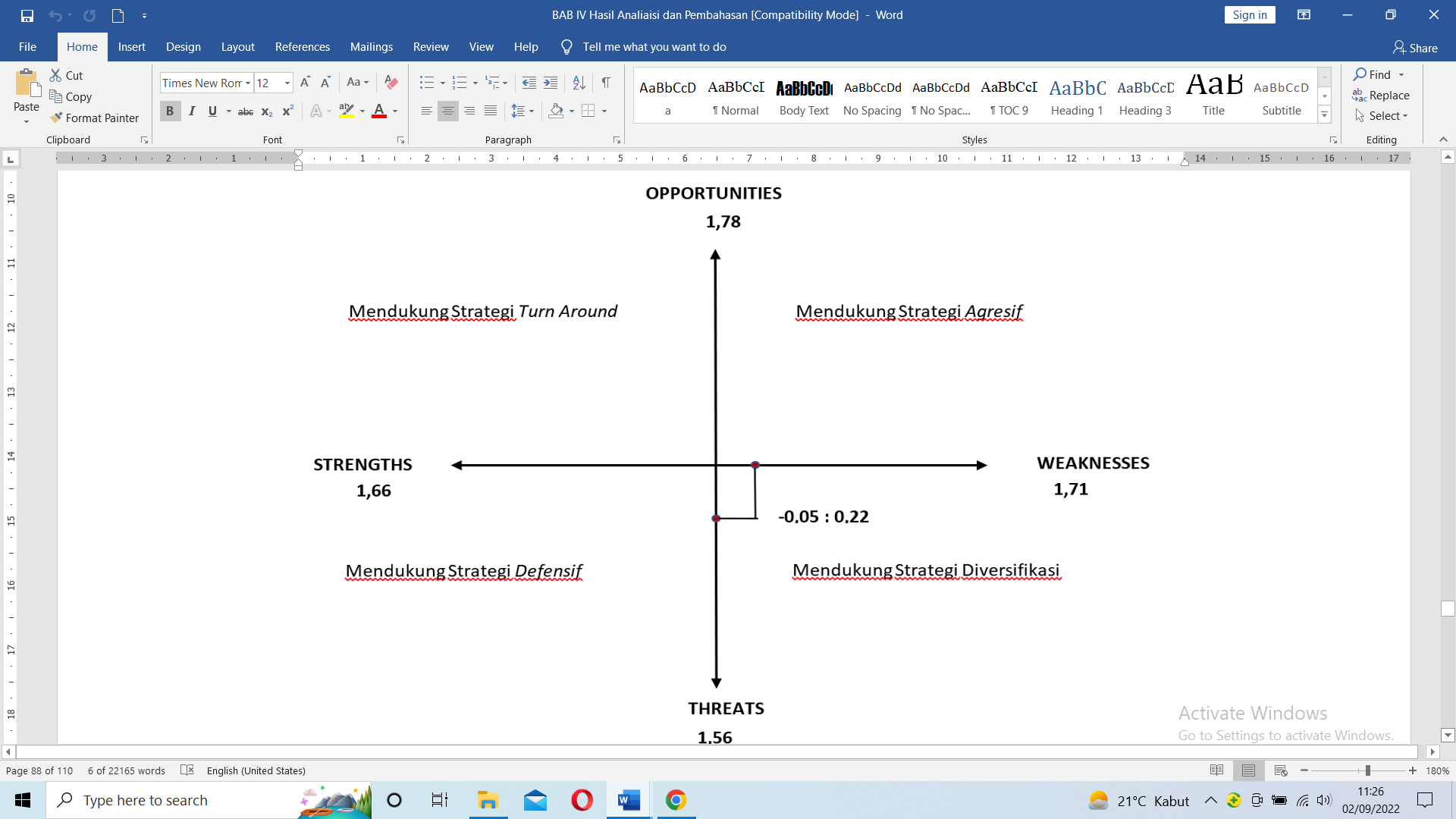
Cara perhitungan SFAS (*Summary Factors Analysis Strategy*), yaitu :

Z = ( S + W ) – ( O ) + ( T )

= 3,37 – 3,33

= 0,04 (positif)

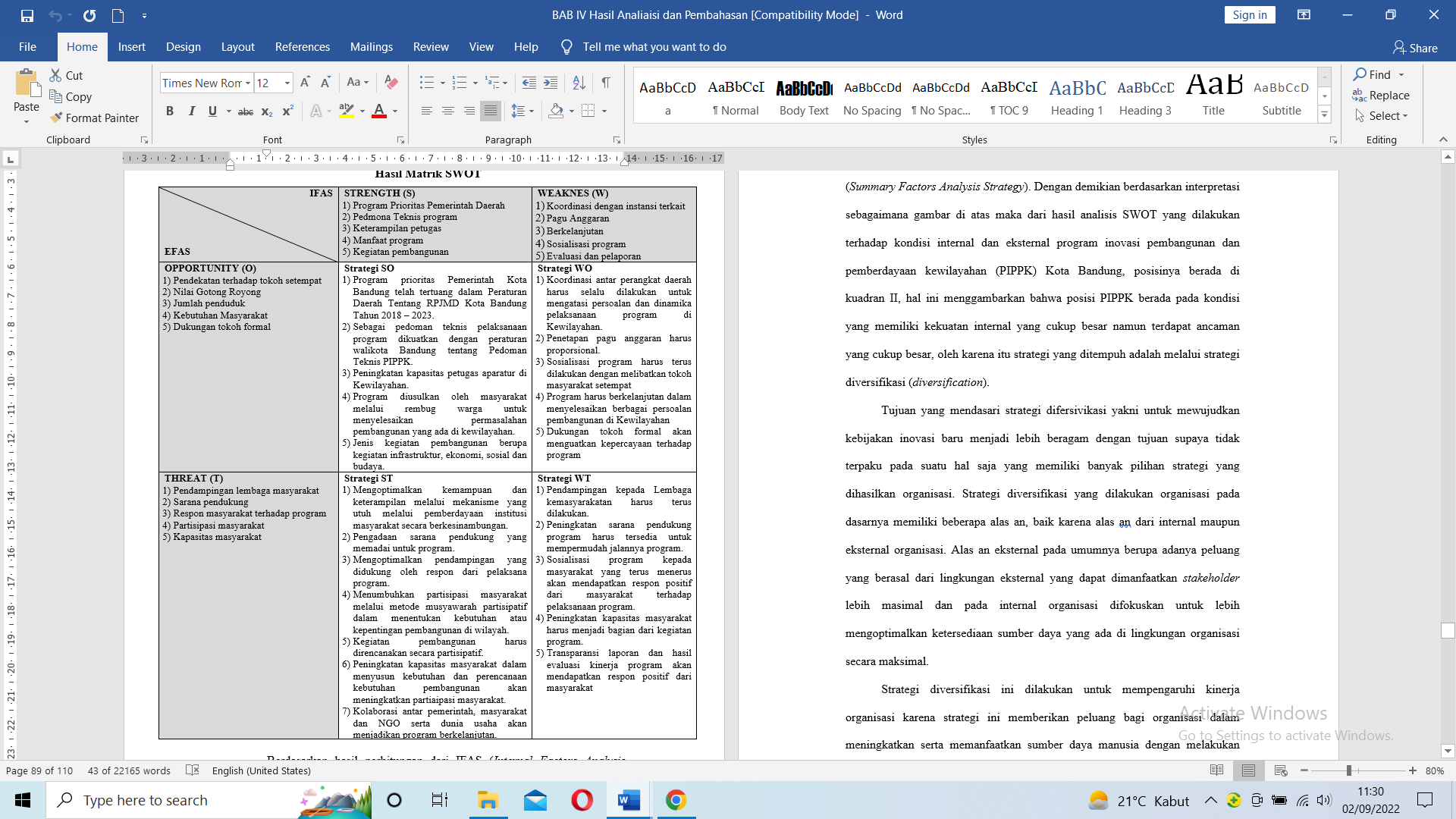
Berdasarkan kondisi IFAS dan EFAS tersebut maka posisi program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung akan terlihat dari gambar di bawah ini, yaitu :



**Gambar**

**Diagram Hasil Analisis SWOT**

Hasil analisis SWOT yang dilakukan peneliti berdasarkan identifikasi keempat faktor di atas yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman terdeskripsikan pada matrik SWOT sebagai berikut :



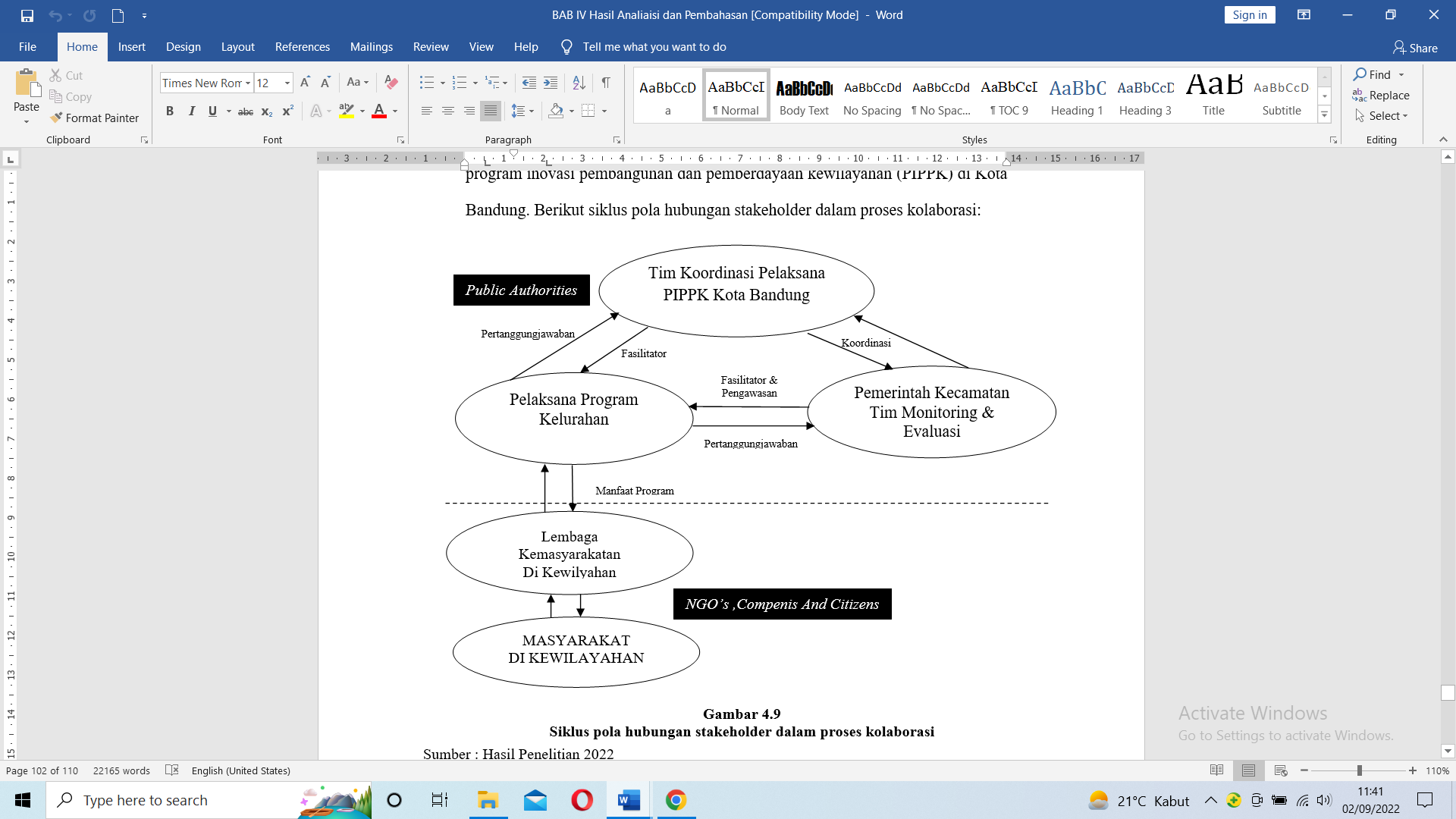
Berdasarkan pada tabel diatas, maka rekomendasi yang diberikan adalah Strategi Diversifikasi (S-T) dimana strategi ini menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi yang dipilih adalah strategi diversifikasi konsentris, yaitu tindakan untuk membuat sesuatu lebih beragam tidak terpaku pada satu jenis, berikut strategi implementasi PIPPK Kota Bandung :

1. Mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan melalui mekanisme yang utuh melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan secara berkesinambungan.
2. Pengadaan sarana pendukung yang memadai untuk program.
3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui metode musyawarah partisipatif dalam menentukan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam pembangunan di wilayah.
4. Kegiatan pembangunan harus direncanakan secara partisipatif.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyusun kebutuhan dan perencanaan kebutuhan pembangunan akan meningkatkan partiaipasi masyarakat.
6. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan NGO serta dunia usaha akan menjadikan program berkelanjutan

**Novelty Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti merumuskan dari faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung, selanjutnya mencoba memberikan alternatif solusi kepada Pemerintah Kota Bandung untuk implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) yang efektif melalui strategi peningkatan kolaborasi, transparansi program dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung.

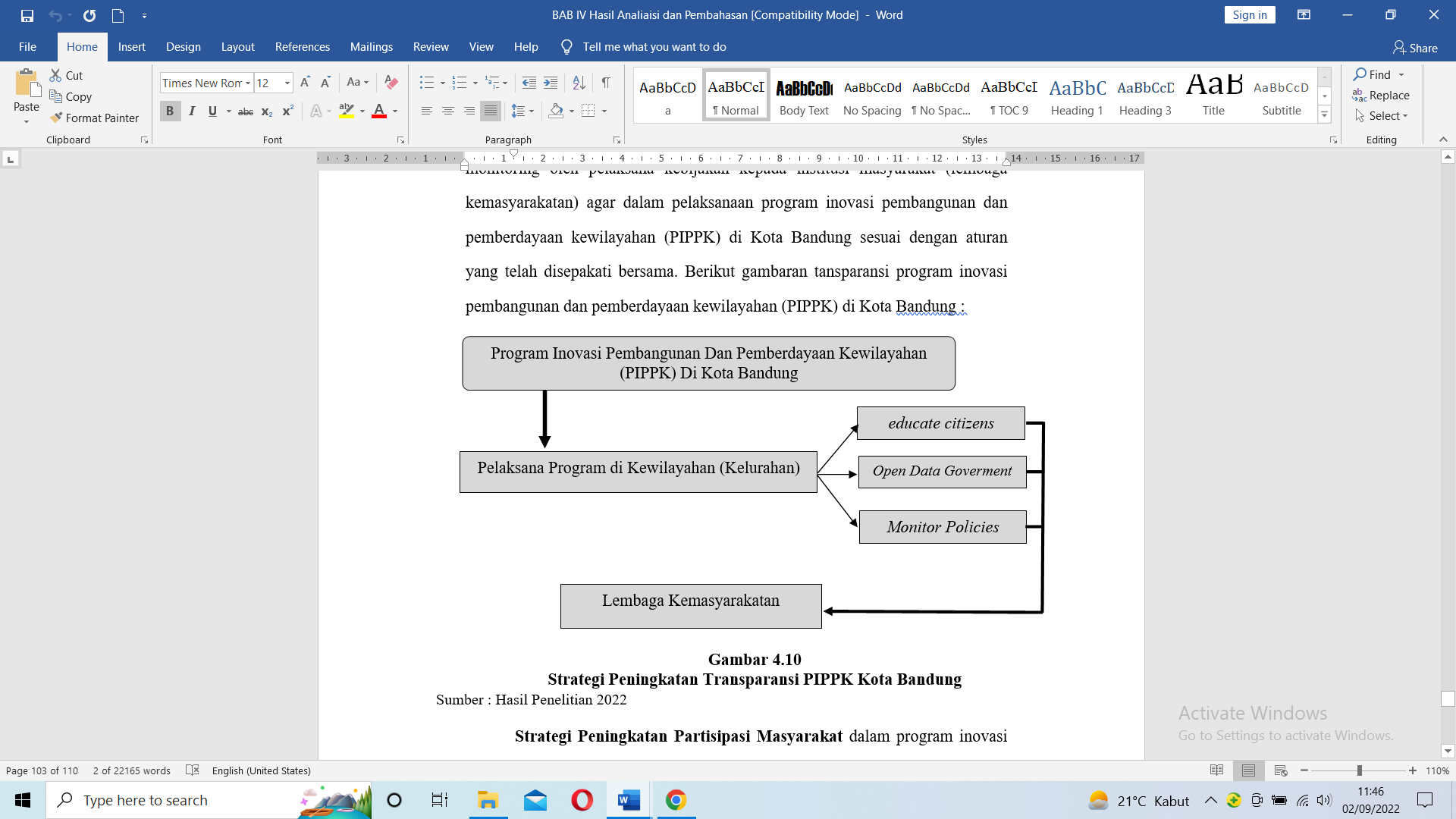
* 1. **Strategi peningkatan kolaborasi**



**Gambar**

**Siklus pola hubungan stakeholder dalam proses kolaborasi**

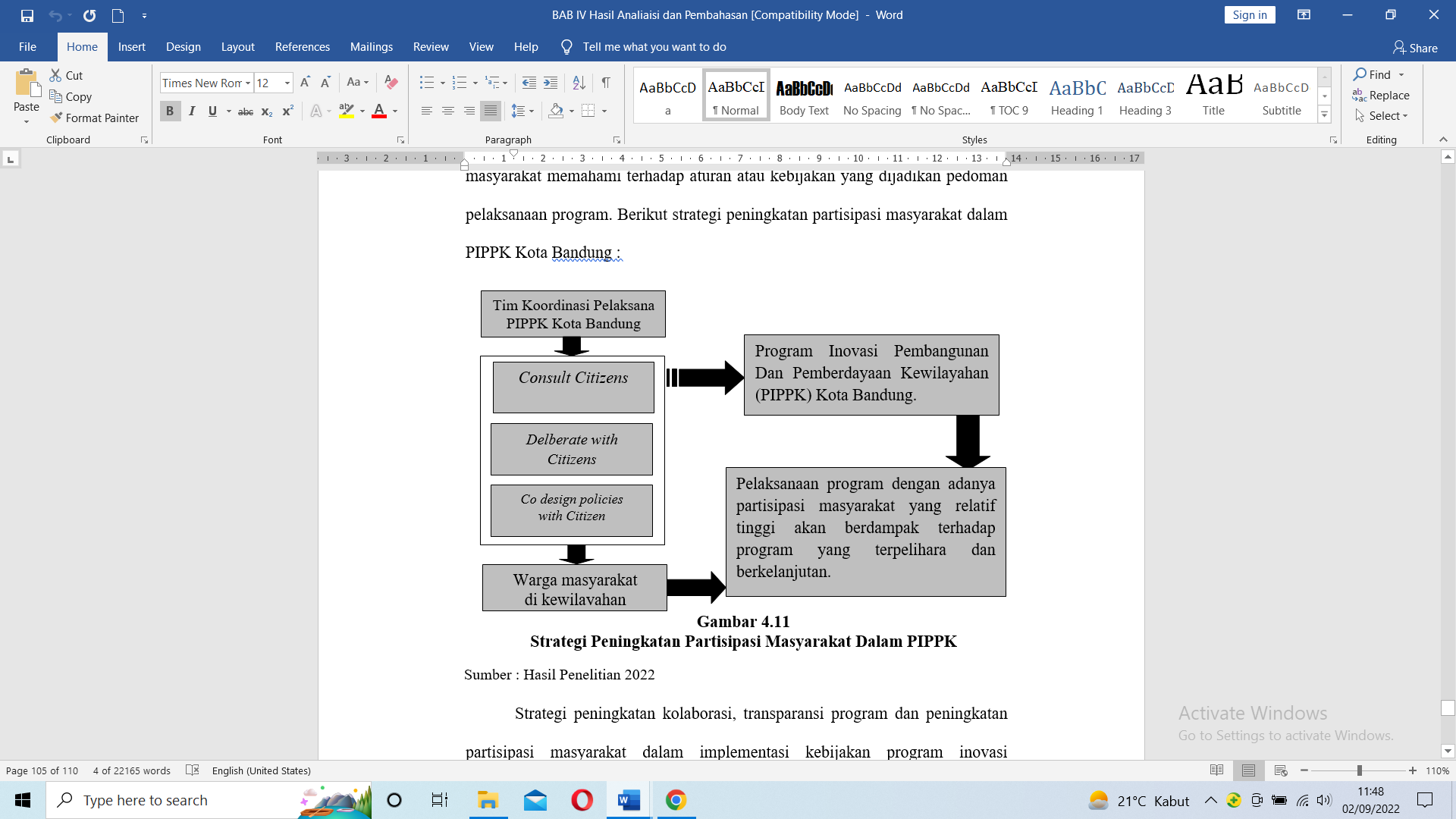
1. **Strategi transparansi PIPPK**



**Gambar**

**Strategi Peningkatan Transparansi PIPPK Kota Bandung**

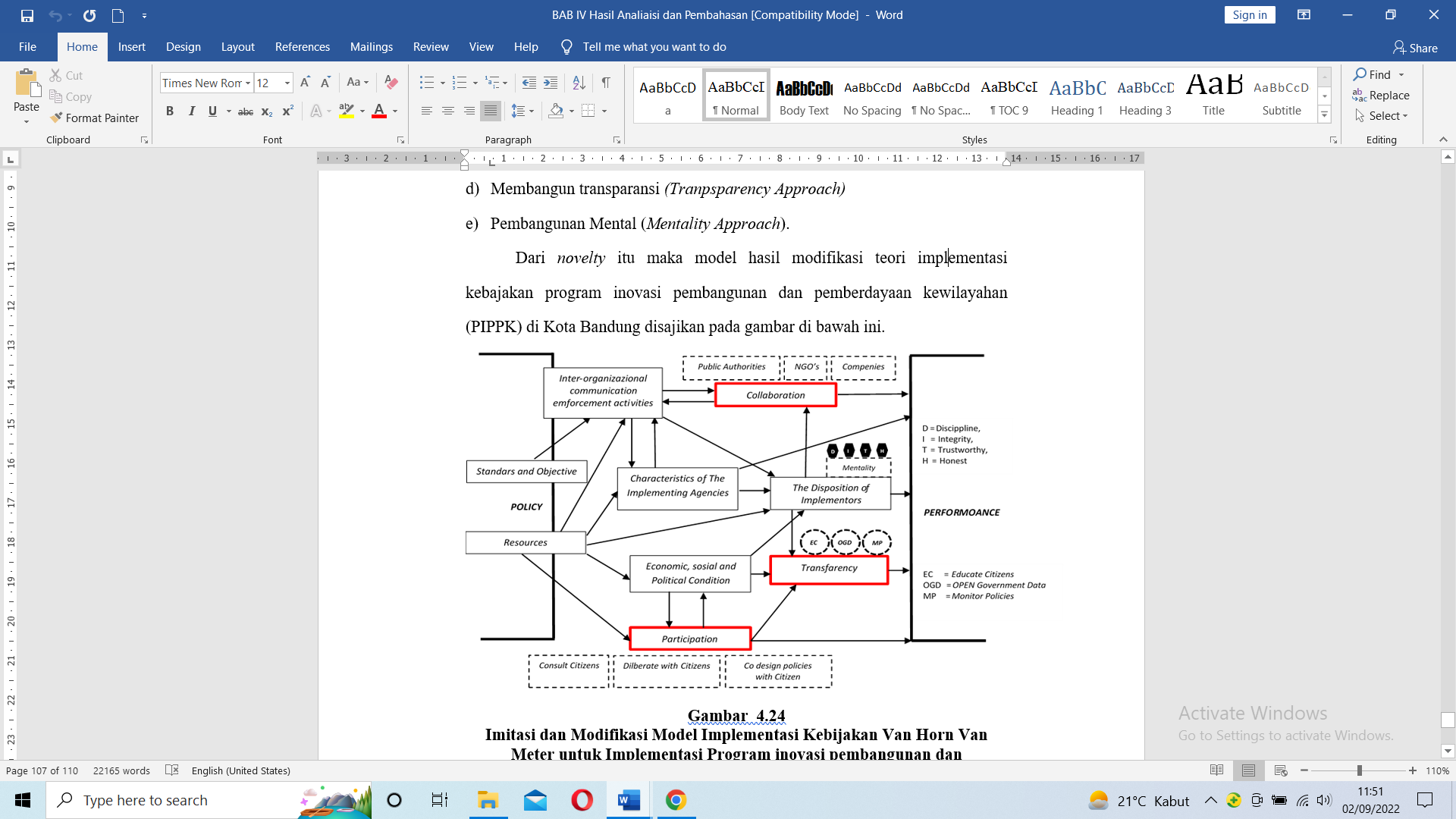
1. **Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat**



**Gambar**

**Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam PIPPK**

Berdasarkan dari *novelty* yang telah diuraikan maka model hasil modifikasi teori implementasi kebajakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung disajikan pada gambar di bawah ini.



**Gambar**

**Modifikasi Model Implementasi Kebijakan Van Horn Van Meter untuk Implementasi Kebijakan PIPPK di Kota Bandung**

Konsepsi kolaborasi, tranparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) dengan menerapkan konsep *reward and punishment* atau insentif dan disinsentif. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih terpacu dan bersemangat untuk mewujudkan implemenatsi kebijakan pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK). Demikian juga program pemberdayaan SDM agen pemerintah dan masyarakat kewilayahan di Kota Bandung harus menjadi fokus utama dan diprioritaskan. Apabila konsep dan strategi ini diterapkan, maka hasilnya akan lebih responsif dan efektif daripada konsep yang telah dijalankan secara normatif.

**Saran**

* + 1. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif menyangkut strategi implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung, terutama untuk menguji secara lebih cermat model implementasi yang direkomendasikan peneliti pada novelti penelitian, yakni variabel ”kolaborasi, tranfaransi dan partisipasi”.
    2. Diperlukan peningkatan kualitas dan intensitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara dan lembaga kemasyarakat yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.
    3. Perencanaan pengembangan program pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung hendaknya melibatkan secara aktif lembaga kemasyarakatan dari seluruh tingkatan dimulai dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kota Bandung.
    4. Pemerintah daerah bersama-sama lembaga kemasyarakatan serta *stakeholder* pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung hendaknya menyusun dan merencanakan *road map* pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.
    5. Lembaga legislatif sebagai lembaga politik dan normatif, hendaknya membangun kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman mendalam tentang konteks dan konten pemberdayaan, sehingga dapat terbangun *mindset* yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adams, Robert, 2003, *Social Work and Empowerment*, New York: Palgrave Macmillan

Adi, Isbandi Rukminto, 2008, Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers

Adi, Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunikasi, Jakarta, Lembaga Penerbit FE UI.

Aditya T, 2009. Teori Pemberdayaan Dan Advokasi.http://id.teguh.web.is/

Aileen Mitchel stewart, 1994. *Empowering People*, Amazon

Amartya Sen, 2000. Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan, Bandung Penerbit Mizan.

Anderson, James E. *Public Policy,* 1979 New York : Holt, Rinehart and Winston.

Andrew Smith, 2007. *Influencing and Empowering People*, Global Business Network.

Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Kajian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Azhar Kasim, 1984. Tantangan Terhadap Pengmbangan Administrasi Publik di Indonesia. Jakarta. Bisnis dan Birokrasi. Nomor 2/Vol 1.

Bartle, Phil, 2007, *Elements of Community Strength*, [*http://www.scn.org/mpfc/modules/mea-elin.htm#Measuring*,](http://www.scn.org/mpfc/modules/mea-elin.htm#Measuring) diunduh pada 4 September 2018.

Budiman Rusli, 2013 Kebijakan Publik, Bandung Hakim Publishing.

Budi Riyanto, 2005, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan kawasan pelestarian alam. Bogor Penerbit LPHKL.

Budi Winarno, 2013, Kebijakan Publik, Peneribit CAFS, Yogyakarta.

Clutterbuck, David and Susan Kernaghan., *The Power Of Empowerment*. Londong. British Library.

Creswell, Jhon W,. 1994*. Research Desaign, Qualitative, Quantitative Appr*oaches. London. Sage Publication

Cousins, J. Bradley, 2005, *Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up?: A Critical Friend Perspective, Empowerment Evaluation: Principles in Practice, New York: The Gulford Press*

Cousins, J. Bradley, 2005, Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up?: A Critical Friend Perspective, Empowerment Evaluation: Principles in Practice, New York: The Gulford Press.

Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inkusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edi Suharto, 2014 Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung Refika Aditama.

Edi Suharto, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Erik Qualman, 2012. *Digital Leader, New York. Mc Graw Hill*.

Ernadi Syaodih, 2015. Manajemen Pembangunan, Bandung Refika Aditama.

Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow, American Journal of Evaluation* 2007; 28; 179

Friedmen J, 1992,., *Empowerment: The Politic of Alternative Development, Cambridge: Blackwell*.

Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work, London:Grower Publishing Company*

Fujikake, Yoko, 2008, *Qualitative Evaluation: Evaluating People’s Empowerent, Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, 2008, pp 25 – 37, Japan Evaluation Society.

Ginanjar Kartasasmita, 1995. Pemberdayaan Masyarakat sebuah Tinjauan Administrasi Buletin Alumni SESPA. Edisi IV Jakarta.

Ginanjar Kartasasmita, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.

Ginanjar Kartasasmita, 1997. Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar Pada Rakyat, Makalah yang disampaikan pada Saresehan DPD GOLKAR TK I Jawatimur, Surabaya 14 Maret 1997.

Harry Hikmat, 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, HUMANIORA

Ife, Jim dan Tesoriero, Frank, 2008, *Community Development*: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Kamal Alamsyah, 2009. Reformasi Administrasi Republik Indonesia, Program Magister dan Doktor Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan.

Korten D.C, 1984. *People Centered Development* West Harford: Kumarian Press

Lichfield, Nathaniel, 2005, Community Impact Evaluation, London: UCL Press

Patton, Michael Quinn, 2009, Metode Evaluasi Kualitatif (*How to Use Qualitative Methods in Evaluation*), Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Totok Mardikanto dan Porwoko Soebiato, 2013 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Bandung ALFABETA.

Riant Nugroho, 2014. Public Policy, Jakarta Gramedia.

Riant Nugroho, 2013. *Change Management* untuk Birokrasi, Kompas Gramedia.

Riant Nugroho, 2012. Social policy For The developing Country, Jogyakarta Pustaka Belajar.

Robert K. Yin, 2015, Studi Kasus, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rondinelli, Dennis A, 1983. *Decentralization and development* : policy implementation in developing countries, Beverly Hills : Sage, 1983.

Soetomo, 2006, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Stuflebeam, DI,, 1971 *Education, Evaluation and Dicision Making*, Ithaca:Peacock.

Sugiono, 2012. Metode Penelitian Administrasi, Bandung ALFABETA.

UNDP, 2008, *Capacity Development Practice Notes*, New York: United Nation Development Programme

UNDP, 2009, *Capacity Development*: A UNDP Primer, New York: United Nation Development Programme.

Wandersman, Abraham, et al, 2005, *The Principle of Empowerment Evaluation, Empowerment Evaluation: Principles in Practice, New York: The Gulford Press*

Warjio, 2016 Politik Pembangunan, Jakarta Prenadameda Group.

Wilson, Terry, 1996, *The Empowerment Mannual*, London: Grower Publishing Company.

**Disertasi Dan Jurnal**

Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 TAhun 2010, Universitas Negeri Makassar.

Amir Muhidin, 2017, Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa), Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makasar.

Budiyanto. 2005. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perizinan Di Kota Pekalongan. Bandung : Universitas Diponegoro.

Murdani, Irfan. 2009. Implementasi Program Nasioanl Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPM) di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Pasca Sarjana UGM, tidak dipublikasikan.

Haryono, 2010, Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat: Kasus ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor, Universitas Indonesia.

Kamuli, S. 2012. Dampak Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari Pada Produkttvitas Nelayan Tradisional. Gorontalo : FIS Universitas Negeri Gorontalo.

Kamuli, S. 2014. Evaluasi Tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Vol. 30 No. 1 Juni 2014. Fakultas Imu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

Katiman. 2009. Implementasi PNMPN Mandiri dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Kasus PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan) di Kecamatan Lohbener dan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Pasca Sarjanan UGM, tidak dipublikasikan.

Parlindungan, Kusuma, W dan Suhartono, Djoko. 2013. Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya. Pontianak : Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Pusat Studi Reformasi Birokrasi Dan *Local Governance* universitas Padjadjaran **,**2018 Capaian Kinerja Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan, Bappelitbang Kota Bandung.

Sukowati, Nuryatin Phaksy, Hadi, M dan Rengu, Stefanus P. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda Dan Spm) Malang : Jurusan Adminsitrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Samun, Muhammad, 2018 Implementasi Kebijakan Publik Pembangunan Minapolitan Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Indramayu, Program Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Ilmu Administrasi PublikProgram Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.

Tafiqurahman UNPAD, 2015, Implementasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Universitas Padjadjaran.

**Peraturan-Peraturan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, Humas Kota Bandung.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, Humas Kota Bandung.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, Humas Kota Bandung.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, Humas Kota Bandung.

Keputusan Walikota Bandung Nomor : 138/Kep.440-Bag.Pem.Um/2015 Tentang Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung Tahun 2015.

1. **Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung – Indonesia** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung – Indonesia** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung – Indonesia** [↑](#footnote-ref-3)